BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan suatu studi yang telah lama ada dan masih ada sampai saat ini, walaupun pada waktu tertentu mengalami kemajuan dan perubahan dalam beberapa bidang yang diikuti oleh kemajuan dalam bidang yang lain yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia. Segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan,dan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak cara berpikir dari manusia. Di antara mereka yang menyutujui istilah yang lebih luas terdapat pula perbedaan pendapat mengenai perbedaan politik internasional dalam rangka hubungan internasional(Darmayadi, dkk 2015: 10-23).

Suatu negara tidak bisa bertahan dengan sendirinya, negara membutuhkan ketekaitan dan relasi dengan negara lain. Negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, sekaya apapun negara tersebut. Hubungan Internasional merupakan fakta bahwa penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara yang merdeka, yang mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. Oleh karena itu, negara-negara biasanya berhubungan dalam pasar internasional yang mempengarunhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahtraan

warga negaranya. Ketika negara-negara terasing dan terputus dari sistem negara, baik karena pemerintahannya sendiri atau karena kekuatan-kekuatan asing rakyat akan menderita sebagai akibatnya(Jackson dan Sorensen, 2013: 4-5).

Ilmu Hubungan Internasional sendiri merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya, ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang muncul kira-kira sekitar tahun 1930an, yang diawali dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya berupa penelitian dan pengkajian akademis dengan kajian interdisipliner, ilmu ini dapat menggunakan berbagai konsep dan teori serta pendekatan dari bidang-bidang ilmu lainnya dalam mengembangkan kajian-kajiannya. Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles Mc Clelland mendefiniskan Hubungan Internasional studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia(Perwita dan Yani, 2017:3-4).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya, namun pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya hubungan antar negara saja, dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam dunia, tetapi juga hubungan antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang mempunyai kepentingan, sehingga negara tidak selalu menjadi aktor utama tetapi

merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara. Batas batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2017:3-4).

Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara. Hubungan Internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah-istilah seperti Hubungan Internasional, politik dunia (*world politics*) dan politik internasional memiliki arti yang sama. Hubungan Internasional sebagai sebuah studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub individu-individu. Tujuan utama dalam studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara. Didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional(Perwita & Yani, 2017:4-5).

Beberapa konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Peranan, merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.

2. Konsep pengaruh, didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain yaitu dengan cara yang di kehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama, dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri.
4. Analisis Sistem, bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita Dan Yani, 2005:29-34). Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, menyatakan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional(Perwita & Yani, 2017:29-34).

Dalam perjalanannya ilmu Hubungan Internasional terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, Hubungan Internasional yang pada awalnya

hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat telah mengalami pergeseran, dimana muncul aktor-aktor lain dalam ilmu Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan penting seperti *non state actor*. Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian memperluas bentuk kajiannya yaitu untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan juga kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer(Rudy, 2003: 51).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan "objektif" dan, oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai (Sugiono, 2006: 6).

Adapun bebrapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik,militer, ekonomi,

dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri(Sugiono, 2006: 6).

Kerjasama internasional ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan
3. Mempermudah investasi. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000 : 45).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktoraktor internasional lainnya. Karena dalam suatu kerjasama internasional adanya saling

ketergantungan diantara aktor-aktor internasional tersebut. Dalam suatu kerjasama internasional juga akan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah yang mengikuti sebuah kerjasama :

1. Kerjasama Bilateral

   Kerjasama dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

2. Kerjasama Regional

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).Kerjasama Multilateral Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO, pertahanan dan keamanan (NATO)) (Djelantik, 2008 : 85-87).

2.1.2.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan guna mencapai tujuan bersama. Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian.
2. Tukar menukar Duta Besar.
3. Kunjungan kenegaraan.

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*)(Rudy, 2002: 127).

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan masing-masing negara dan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut dapat terjadi dalam berbagai konteks yang berbeda. Banyak hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama yang berlangsung diantara dua negara yang memiliki kepentingan atau sedang menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dapat terjadi diantara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat untuk mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua

negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya yang merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi atau kerjasama. Kerjasama bilateral sebagai suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara seperti penandatanganan atau perjanjian, tukar menukar Duta Besar dan kunjungan kenegaraan. Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliputi proses rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai, persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima, respon atau aksi balik dari negara penerima serta persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa(Perwita dan Yani, 2017:42).

Kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis. Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjugan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak(Rudy, 2002: 125-127).

Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. Kerjasama bilateral yang terjalin antara dua negara bertujuan agar masing-masing negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga dapat mempererat hubungan persahabatan diantara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan kerjasama dengan negara lain maka perlu langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam kerjasama bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negaranegara yang terlibat didalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Seperti yang dituliskan oleh Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam bentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut(Rudy, 2002 : 137)

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan rencana tindakan atau strategi yang dibuat oleh para aktor pembuat keputusan negara dalam mengahadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional secara spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijkan luar nergeri yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara memang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu bangsa yang dilakukan oleh aktor yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan

nasional itu, negara-negara maupun aktor dari dari negara akan melakukan begagai macam kerjasama di antaranya kejasama regional, kerjasama bilateral, trilateral dan multirateral(Perwita & Yani, 2017:49).

Pengertian kebijakan luar negri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap aktivitas dan sikapnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Menurutnya kebijakan luar negeri ditunjukan untuk mempertahankan dan memelihara kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, apabila mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka akan memasuki fenomena yang lebih luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal, dan kebutuhan eksternal termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti mengenai aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, instuisi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara bangsa(Perwita & Yani, 2017:49).

Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi atau tindakan yang dibentuk oleh para pengambil keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain maupun unit politik internasional lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan ke dalam kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri dijalankan oleh pemerintah suatu negara sebagai upaya untuk pemenuhan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri melingkupi semua tindakan dan aktivitas suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya sebaga upaya untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan tersebut(Rudy, 2002: 49).

Politik luar negeri sebagai sistem aktifitas yang di kembangkan oleh suatu negara untuk merubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas negara itu sendiri terhadap lingkungan internasional. Politik luar negeri terdiri dari rencana tindakan (*courses of actions)* yang digunakan oleh sebuah negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang melampaui batas-batas yurisdiksinya sendiri. Politik luar negeri adalah "lebih dari sekedar kumpulan beberapa kebijakan khusus yang ditunjukan kepada negara tertentu". Politik luar negeri suatu negara memperhitungkan beberapa faktor, seperti estimasi tentang kekuatan dan kapabilitasnya sendiri, prinsip-prinsip prilaku yang dianut negara itu sendiri, tujuan spesifik dari kepentingan nasional yang ingin dicari dalam hubungan luar negeri, dan sebagainya. Politik luar negeri juga mencakup strategi, komitmen, dan taktik diambil untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan negara(Bakry,2017:156).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas dikalangan para penstudi hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama negara bangsa (*Nation State*) masih merupkan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan negaranegara menjalankan hubungan internasional (International Relation) adalah kepentingan nasionalnya(Rudy, 2002: 60).

Kepentingan Nasional sangat penting untuk menjeleaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional dapat dijadikan dasar untuk

menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut paham realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya sebuah negara untuk mengejar power atau kekuasaan. Dimana power merupakan segala sesuatu yang dapat mengembangkan maupun memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan juga tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) di dalam politik internasional. Kepentingan nasional juga merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan suatu negara untuk membuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan bentuk kebutuhan suatu negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahtraan ekonomi(Perwita & Yani, 2017: 35).

Kepentinngan nasional tercipta karena dari kebutuhan suatu negara, Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politikekonomi, militer, dan sosial-budaya. kepetingan juga didasari akan suatu ‟power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagi negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan nasional secara konseptual, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara(Sitepu, 2011: 163).

Kepentingan nasional diklasifikasikan dalam kepentingan vital dan skunder, lalu membedakan dalam kepetingan permanen dan temporer, kepentingan spesifik dan *general* serta kepentingan yang juga bersifat *conflicting* dan komplementer. Kepentingan vital adalah seperti mempertahankan integritas teritorial, sedangkan kepentingan sekunder contohnya seperti menyangkut perlindungan warga negara di luar negeri. Kemudian kepentingan permanen merupakan kepentingan yang tidak akan berubah dalam jangka panajang, sedangkan temporer kepentingan yang ingin dicapai suatu negara di waktu tertentu. Ada juga kepentingan general yang diaplikasikan suatu negara pada wilayah yang lebih luas seperti menjaga perdamaian dunia, sedangkan kepentingan spesifik merupakan kepentingan yang mencakup suatu wilayah dan isu terbatas. Sementara *conflicting interest* merupakan kepentingan negara yang dapat menimbulkan konflik, sebaliknya kepentingan komplementer merupakan kepentingan yang saling melengkapi(Bakry,2017:60).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (power). Kekuasaan (power) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-

strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (power) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. Tangible elements (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)

a. Populasi (jumlah penduduk)

b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)

c. Sumber alam dan kapasitas industri

d. Kapasitas produksi pertanian

e. Kekuatan dan mobilitas militer

2. Intangible elements (tidak dapat diukur)

a. Kepemimpinan nasional (leadership and personality)
b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
c. Tipe dan gaya pemerintahan
d. Keterpaduan masyarakat (social cohesiveness)
e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
f. Peristiwa-peristiwa tertentu(Rudy, 2002: 114).

Kepentingan nasional sering diidentikan dengan tujuan nasional. Namun pada hakikatnya kepentingan nasional dan tujuan nasional berbeda. Tujuan nasional (*national goals*) pada umumnya memiliki cakupan yang luas, lebih mendasar, berjangka panjang, cenderung filosofis serta bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan dari tujuan nasional yang lebih spesifik, cakupannya terbatas biasanya difokuskan pada program maupun bidang tertentu, cenderung praktis serta mudah berubah yang disesuaikan dengan kebutuhan negara pada saat itu. Sehingga kepentingan nasional bersifat dinamis yang dapat berbubah-ubah sesuai waktu, situasi dan kondisi(Rudy, 2002:116).

2.1.5 Ekonomi Politik Intenasional

Ekonomi politik global adalah bidang studi yang berkaitan dengan interaksi antara kekuatan politik dan ekonomi. Selalu ada pertanyaan tentang kesejahteraan manusia dan bagaimana ini mungkin terkait dengan perilaku negara dan kepentingan perusahaan di berbagai belahan dunia. Meskipun demikian, pendekatan utama di lapangan sering lebih berfokus pada perspektif sistem internasional. Efek samping dari hal ini adalah pengabaian relatif terhadap non-

elit dan pengakuan yang terlalu sering terhadap individu biasa. Sementara negara tetap menjadi pusat politik internasional, mereka secara bertahap mengintensifkan hubungan mereka dengan perusahaan multinasional dan memperkuat keterlibatan mereka dengan organisasi internasional. Secara alami, perubahan-perubahan ini di dunia sekitar kita telah menyebabkan pemikiran ulang tertentu dari cara kita memahami dan menempatkan individu sebagai aktor dalam ekonomi global. Marxis yang berpendapat bahwa kapitalisme internasional akan mengarah pada akhir negara karena kelemahan yang melekat pada kapitalisme. Boleh dibilang, pendekatan liberallah yang telah memberikan aktor individu (bukan negara atau kelompok sosial) panggung utama untuk analisis. Dengan demikian, pendekatan liberal terhadap ekonomi politik global merupakan fondasi dari bab ini karena mereka menawarkan cara yang lebih nyata untuk menyajikan isu-isu kompleks ekonomi global kepada seorang pemula dengan cara yang dapat diterima (Walzenbach,2017:87)

Ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Kepentingan nasional secara secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Konsep ekonomi politik sebagai dinamika interaksi global antara pengerjaan kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan(ekonomi). Dalam definisi ini terdapat hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Negara dan pasar saling berinteraksi untuk

mempengaruhi pembagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional(Perwita & Yani, 2017:75-76).

Pengertian politik internasional dan ekonomi politik internasional merupakan suatu kontruksi guna memahami ekonomi-politik internasional. Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan *"who gets what, when, and how?"* Ekonomi internasional merupakan internasional merupakan prilaku negara untuk memenuhi daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi-politik internasional. Menurut spero ada empat cara faktor politik yang mempengaruhi ekonomi, yaitu:

1. Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional.
2. Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi.
3. Kebijakan-kebijakan ekonomi di tuntun oleh kepentingan politik.
4. Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses dimana negara-negara mengatur konflik dan kerjasama untuk mencapai tujuan(Perwita & Yani, 2017:76-77)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk percepatan ekonomi Jakarta-Bandung merupakan salah satu interaksi dalam hubungan internasional. Terjadinya hubungan ini merupakan

sebab akibat dari adanya saling ketergantungan, karena setiap negara akan memerlukan bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan juga untuk memenuhi kepentingan bersama.

Kerjasama antara Indonesia-China yang termuat dalam MoU antara menteri BUMN dan China mengenai kerjasama di bidang pembangunan kereta cepat yang merupakan salah satu kerjasama dari banyaknya kerjasama yang telah disepakati. Melalui salah satu kerjasama di bidang pembangunan kereta cepat, hubungan Indonesia-China yaitu dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Perjanjian antara Indonesia dan China merupakan bentuk perjanjian bilateral yang dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing negara. Dimana pemenuhan kepentingan nasional merupakan bentuk dari kebutuhan negara. Dalam hubungan internasional kepentingan nasional merupakan alat terjadinya berbagai interaksi internasional dibanyak bidang, sepeti halnya dalam bidang pembangunan karena terjadinya interaksi antara Indonesia-China melalui BUMN dengan China yang melakukan kerjasama pembangunan kereta cepat.

Kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan dengan China merupakan suatu pilihan kebijakan tepat karena politik luar negeri suatu negara memperhitungkan beberapa faktor, seperti estimasi tentang kekuatan dan kapabilitasnya sendiri, prinsip-prinsip prilaku yang dianut negara itu sendiri, tujuan spesifik dari kepentingan nasional yang ingin dicari dalam hubungan luar negeri. China yang dianggap mampu untuk diajak kerjasama di bidang pembangunan khususnya pembangunan kereta cepat Jakarta-

Bandung karena China dianggap telah memiliki kereta cepat dan juga china memiliki ambisi dalam ekspansi dagang untuk memperluas pengaruh dan akses ekonominya.

Interaksi antara Indonesia-China merupakan interaksi ekonomi politik yaitu sebagai dinamika interaksi global antara pengerjaan kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi). Dalam definisi ini terdapat hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Karena ekonomi dan politik akan saling mempengaruhi satu sama lainnya terhadap hubungan antar negara yang mana dalam ini adalah hubungan antara Indonesia dan China.

Dengan dilakukannya kerjasama Indonesia-China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan meenjadi hubungan kerjasama yang akan menjadi salah satu pemenuhan kepentingan antara Indonesia dan China dan juga menjadi alat untuk percepatan ekonomi Indonesia.

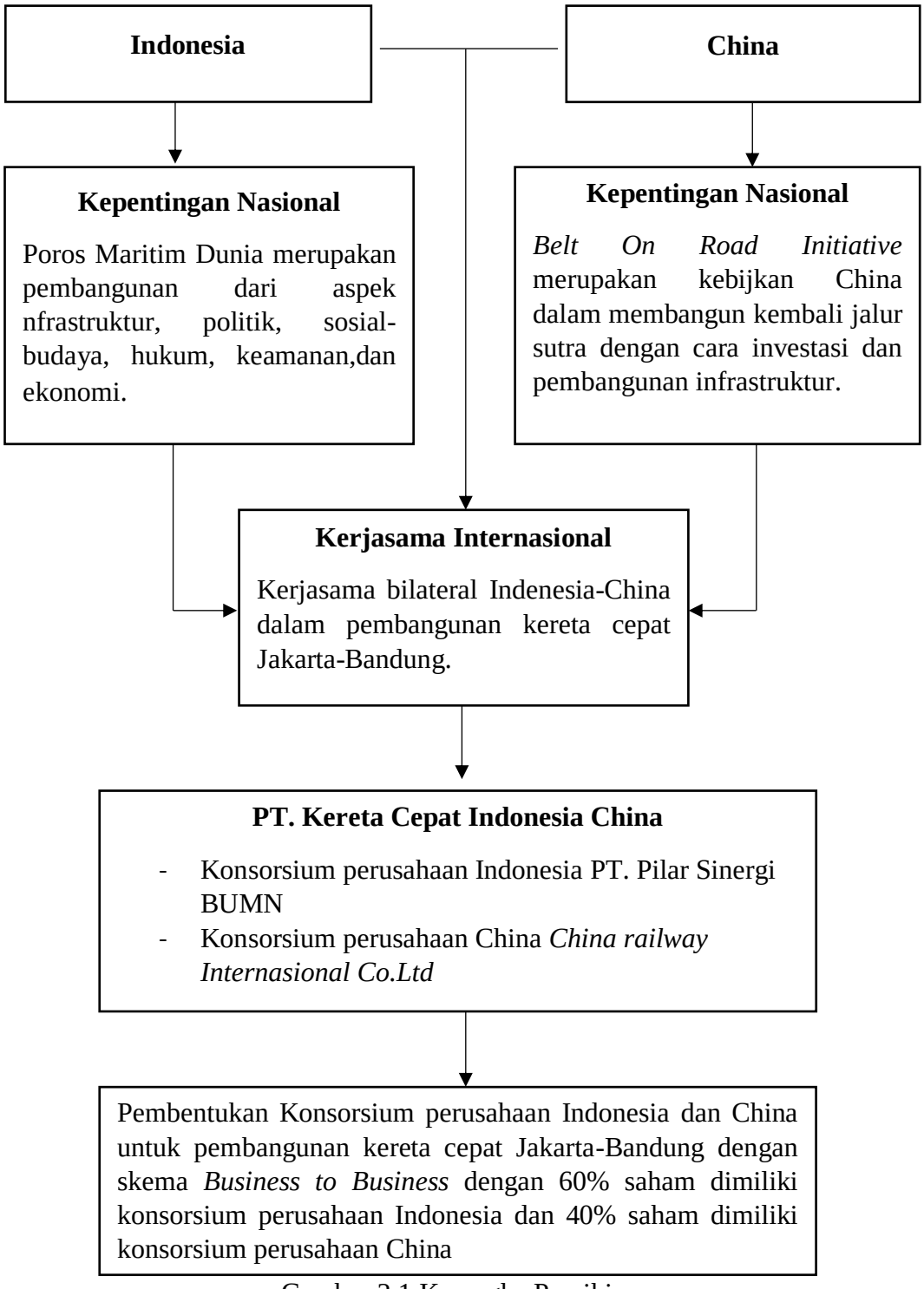

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran